BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis yang terus mengalami perubahan dan kompetisi yang ketat, pemahaman mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan menjadi sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Pemilik usaha, terutama dalam menghadapi kompleksitas operasional dan ketidakstabilan pasar, membutuhkan gambaran yang jelas dan detail terkait laporan keuangan. Laporan keuangan berperan sebagai alat utama yang menyajikan informasi penting mengenai kesehatan finansial perusahaan. Sejalan dengan itu, tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan agar dapat terus bertahan dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat turut mendorong bertambahnya jumlah badan usaha, yang kemudian menuntut setiap entitas bisnis untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik agar mampu bersaing secara efektif (Supatmin, 2023). Adapun data perusahaan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 1
Data Perusahaan di Indonesia

38 Provinsi	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit)	
	Mikro	Kecil
	2023	2023
ACEH	106.527	3.999
SUMATERA UTARA	119.539	7.368
SUMATERA BARAT	84.077	4.144
RIAU	60.273	2.090
JAMBI	33.742	792
SUMATERA SELATAN	75.282	1.934
BENGKULU	25.595	936
LAMPUNG	77.575	3.680
KEP. BANGKA BELITUNG	15.776	486
KEP. RIAU	25.873	394
DKI JAKARTA	69.072	10.920
JAWA BARAT	584.903	56.736
JAWA TENGAH	611.039	51.887
DI YOGYAKARTA	129.289	4.736

38 Provinsi	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit)	
	Mikro	Kecil
	2023	2023
JAWA TIMUR	862.057	115.414
BANTEN	90.908	6.184
BALI	120.752	5.035
NUSA TENGGARA BARAT	131.958	18.004
NUSA TENGGARA TIMUR	124.566	1.374
KALIMANTAN BARAT	47.435	1.021
KALIMANTAN TENGAH	27.952	599
KALIMANTAN SELATAN	64.528	2.842
KALIMANTAN TIMUR	34.586	1.055
KALIMANTAN UTARA	5.763	207
SULAWESI UTARA	59.112	1.849
SULAWESI TENGAH	69.057	7.072
SULAWESI SELATAN	119.613	4.313
SULAWESI TENGGARA	47.415	1.738
SULAWESI TENGAH	69.057	7.072
SULAWESI SELATAN	119.613	4.313
SULAWESI TENGGARA	47.415	1.738
GORONTALO	38.089	836
SULAWESI BARAT	21.947	541
MALUKU	61.308	199
MALUKU UTARA	17.016	322
PAPUA BARAT	5.553	284
PAPUA BARAT DAYA	0	0
PAPUA	12.951	465
PAPUA SELATAN	0	0
PAPUA TENGAH	0	0
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0
INDONESIA	4.181.128	319.456

Sumber : Data Statistika 2023

Dalam menghadapi persaingan tersebut, laporan keuangan menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi serta kinerja manajerial perusahaan. Agar laporan keuangan dapat digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka penyusunannya harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia (Reonika, dkk., 2024).

SAK berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menyusun informasi keuangan yang relevan dan dapat dibandingkan (Rusdianto, 2019). Tidak hanya

itu, SAK EP (Entitas Privat) juga hadir sebagai standar pelaporan khusus bagi entitas privat yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas publik yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis entitas, besar maupun kecil, tetap membutuhkan pelaporan keuangan yang sesuai standar (Maulana, dkk., 2023). Per 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan revisi terhadap SAK ETAP, dengan menggantinya menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Penggantian ini dilakukan karena SAK EP dianggap lebih komprehensif dalam penyajiannya, sehingga digunakan sebagai standar transisi dari SAK ETAP (Lusiono, dkk., 2024). SAK Entitas Privat ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

SAK EP disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang selaras dengan praktik akuntansi keuangan secara umum, seperti konsistensi, relevansi, keterbandingan, transparansi, dan akurasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut, SAK EP memberikan banyak keuntungan. Penerapan SAK EP membantu entitas dalam menjaga citra baik serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, dan kreditor. Penerapan standar ini juga mempermudah entitas dalam menilai efisiensi operasional, kondisi likuiditas, dan tingkat solvabilitas secara lebih tepat. Hal ini memungkinkan perusahaan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai kondisi keuangan mereka (Aprilia, dkk., 2025).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas,

yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas (Daeli, 2024). Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga alat manajerial yang sangat strategis. Laporan keuangan juga hal penting dalam suatu perusahaan baik perusahaan besar maupun usaha kecil UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan memberikan informasi terkait posisi keuangan serta kinerja keuangan usaha serta dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Selain itu, penting dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Penyajiannya harus bersifat objektif, bijaksana, serta mampu ditafsirkan dengan benar oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, struktur dan format laporan keuangan perlu diatur secara ketat melalui standar akuntansi (Nasrah dan Pratiwi, 2023). Adapun pada laporan keuangan memiliki sifat historis dan menyeluruh dan pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka dari itu, setiap usaha perlu memiliki laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang bertujuan untuk melihat berapa pendapatan yang masuk dan pengeluaran setiap bulan atau tahunnya agar pemilik usaha dapat menilai terkait kondisi keuangan usahanya (Anggraeni, dkk., 2021).

Dalam upaya membangun dan mengelola usaha yang berkelanjutan, tidak hanya pemahaman terhadap laporan keuangan yang penting, tetapi juga penguasaan administrasi bisnis secara menyeluruh. Administrasi bisnis mencakup seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai aktivitas usaha agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam operasional perusahaan. Fungsi administrasi bisnis meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan produksi yang saling

berkesinambungan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan (Suryana, 2022).

Dalam konteks badan usaha di Indonesia, penting untuk dipahami bahwa badan usaha adalah organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan kegiatan yang dilakukan secara tetap dan berkelanjutan. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan secara menyeluruh, sehingga mereka tidak dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara pasti (Daeli, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi laporan keuangan sangat penting. Dengan laporan yang terstruktur dan akurat, perusahaan dapat membangun sistem keuangan yang transparan dan efisien. Optimalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Sari dkk. (2023) adalah upaya untuk mencapai hasil terbaik melalui pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya yang ada.

Optimalisasi mencakup upaya peningkatan atau pengembangan suatu hal yang sudah ada, atau perancangan dan pembuatan sesuatu secara optimal. Laporan keuangan memberikan informasi penting yang memungkinkan pemilik usaha untuk memahami kondisi keuangan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, dan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan keberhasilan usaha (Supatmin, 2023). Maka dari itu, optimalisasi laporan keuangan dapat dipahami sebagai upaya dalam memaksimalkan kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi secara efisien agar terorganisasi dengan baik sehingga dapat menghadapi tantangan atau masalah ketika terjadi penurunan atau kondisi keuangan yang kurang baik (Prakoso, dkk., 2024).

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang memadai.

Beberapa diantaranya hanya mencatat transaksi harian secara sederhana tanpa merujuk pada standar akuntansi seperti SAK ETAP (Ariesta dan Nurhidayah, 2023). Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengendali dan pengambil keputusan. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah Percetakan CV. Zahra Karya Mandiri.

Percetakan CV. Zahra Karya Mandiri yang dimiliki oleh 3 pihak yaitu Bapak Muhyiddin Zainal, Ibu Nurul Aisyah dan Ibu Aliyah. Usaha Percetakan ini dibangun pada tahun 2022 yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 15, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Provinsi Sulawesi Selatan. Percetakan ini bergerak di bidang desain seperti spanduk, *banner, brosur, sablon*, undangan dan lain-lain. Percetakan ini telah terdaftar di e-katalog. E-katalog adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan hasil survei lapangan, adapun alasan peneliti mengapa memilih CV. Zahra Karya Mandiri sebagai lokasi penelitian karna diketahui bahwa sistem pembukuan keuangan pada percetakan CV. Zahra Karya Mandiri masih dilakukan secara manual dan belum tersusun secara sistematis. Hal ini menyebabkan pemilik usaha mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan struktur keuangan, seperti ketidakjelasan dalam melacak posisi modal, keuntungan, pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. (Romadona dan Wijayanti, 2024).

Permasalahan tersebut diperburuk dengan tidak adanya laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, yang berdampak pada kurangnya informasi keuangan yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi yang

sesuai, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). CV. Zahra Karya Mandiri tergolong sebagai entitas privat karena merupakan perusahaan keluarga dan tidak memiliki akuntabilitas publik, sehingga memenuhi kriteria penerapan SAK EP. Dengan menerapkan SAK EP, laporan keuangan dapat disusun secara lebih terstruktur, relevan, dan andal, serta mampu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih tepat dan efisien. Maka dari itu, dirasa perlu untuk merancang dan mengimplementasikan sistem laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EP guna mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha percetakan ini. Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pemilik usaha, dinyatakan bahwa:

> "Nah jadi begini, kami disini itu belum membuat laporan keuangan dari semenjak berdiri percetakan ini, kami cuman membuat catatan-catatan di buku untuk pemasukan dan pengeluarannya karena yang mengelola itu hanya saya dan suami saya dan 2 karyawan makanya belum sempat membuat laporan keuangannya".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha percetakan CV. Zahra Karya Mandiri, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini penyusunan laporan keuangan pada percetakan CV. Zahra Karya Mandiri masih belum dilakukan secara spesifik, terstruktur, dan sistematis. Proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, tanpa adanya pemisahan yang jelas antara aset, kewajiban, modal, serta laporan laba rugi. Hal ini berpotensi menyulitkan dalam melakukan evaluasi kinerja usaha secara menyeluruh serta dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat.

Berdasarkan latar belakang, peneliti memilih untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul "**Optimalisasi Laporan Keuangan pada Percetakan CV. Zahra Karya Mandiri"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan pada percetakan CV. Zahra Karya Mandiri?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan pada percetakan CV. Zahra Karya Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan teoritis dan praktis tentang penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti lain dalam menyusun laporan keuangan.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan pada percetakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan laporan keuangan di masa depan.